



Pemenuhan tuntutan tersebut jelas berkaitan juga dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Umat Islam bisa dikatakan tengah kecewa karena aspirasi mereka mengenai sistem pemerintahan yang disuarakan kalangan Islam dalam BPUPKI dan PPKI tidak terpenuhi. Bahkan Piagam Jakarta yang merupakan hasil minimal bagi umat Islam dan telah menjadi kesepakatan bersama diubah sehari setelah kemerdekaan. Sementara di sisi lain, Belanda tengah mengancam keberadaan pemerintahan yang baru lahir, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya umat Islam yang mayoritas. Karena itulah tanpa pembicaraan panjang, usul didirikannya Kementerian Agama ini langsung disetujui Presiden Soekarno. Ini berarti, pada awalnya kementerian ini sebetulnya dimaksudkan untuk mengurus umat Islam saja. Namun dalam perkembangan berikutnya, kementerian juga mengurus umat non-Islam. Tentu saja, konsentrasi utamanya tetap umat Islam, mengingat mereka adalah mayoritas warga negara Indonesia.

Meski sudah disetujui Presiden, keberadaan kementerian ini tidak luput dari kritik tajam dan bahkan tuntutan agar dibubarkan dengan berbagai alasan. Ketika masa revolusi, tuntutan tersebut nyaris tidak terdengar karena semua pihak disibukkan permasalahan yang lebih besar, yakni menghadapi Belanda. Namun, ketika Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, di mana negara sudah terbebas dari ancaman Belanda, tuntutan tersebut kembali mengemuka. Tugas berat yang harus













Dalam pengembangannya pada penelitian ini mengacu pada kepentingan yang dimiliki oleh *patron*, dalam hal ini adalah K.H.A. Wahid Hasyim, yaitu demi berkembangnya Kementerian Agama, terdapat tiga hal yang dimiliki sesuai dengan dasar teori tersebut.

Pertama K.H.A. Wahid Hasyim memiliki sumber daya yang digunakan dalam menjalankan misi beliau, yaitu dalam mengembangkan Kementerian Agama yang baru lahir ini. Sedangkan sumber daya itu sendiri masih terbagi dalam beberapa cabang, antara lain adalah pengetahuan dan keahlian. Jelas sekali bahwa K.H.A. Wahid Hasyim memiliki pengetahuan dan keahlian, sebab beliau adalah seorang tokoh yang berilmu pengetahuan tinggi. Seorang kyai, negarawan, intelektual dan lain sebagainya, yang telah diabdikan pada agama, negara dan bangsa. Misalnya K.H.A. Wahid Hasyim pernah menjabat sebagai wakil kepala Kantor Urusan Agama (*Shumubu*) dilanjutkan dengan menjadi Menteri Agama tiga periode berturut-turut, bagaimana seorang yang tak berpengetahuan memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin. Sebagai anggota BPUPKI, bagaimana seorang tak berpengetahuan dapat terpilih untuk merumuskan dasar negara Indonesia.

Kedua, sumber daya selanjutnya adalah pemilikan yang berupa material, dan dibawa langsung dalam pengawasan *patron*. Sebagai seorang pemimpin, K.H.A. Wahid Hasyim benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Santrinya di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dalam madrasah Nidzhomiyah, bahkan masyarakat luas pada umumnya.

Ketiga, sumber daya terakhir yang dimiliki oleh *patron* adalah kepemilikan lain yang pengawasannya secara tidak langsung atas barang milik orang lain. Bentuk kepemilikan semacam ini biasanya dimiliki oleh para pejabat, yang pengawasannya dilakukan berdasarkan kekuatan jabatan. Maka berdasarkan kekuatan jabatan itu, seorang pejabat dapat membantu yang bersangkutan. Namun sumber daya yang demikian ini berkedudukan sangat lemah karena tergantung pada jabatan, yang diduduki oleh *patron* tersebut. Meskipun K.H.A. Wahid Hasyim memiliki banyak jabatan di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan negara, beliau selalu menjaga hubungan dengan umat dan masyarakat.

Dari ketiga sumber daya yang dimiliki oleh *patron* tersebut, dapat mempermudah dalam menarik *klien*. Dengan demikian K.H.A. Wahid Hasyim mampu menjadikan Kementerian Agama sebagai wadah untuk mengurus permasalahan semua agama di Indonesia dengan segala sumber daya yang dimiliki beliau. Semua itu bukan tanpa sengaja. Dengan sadar, kemampuan beliau adalah tonggak utama dalam usaha yang telah dilakukan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu penulis menemukan skripsi yang juga membahas tentang K.H Wahid Hasyim yang ditulis oleh Siti Quzaimah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan skripsinya yang berjudul “Perjuangan K.H Wahid Hasyim Dalam Penyusunan Dasar Negara Republik Indonesia. Skripsi ini menulis tentang peranan K.H Wahid Hasyim dalam menyusun Dasar Negara dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Serta perdebatan yang terjadi pada waktu sebelum kemerdekaan tentang Piagam Jakarta.

Serta pembahasan tentang K.H Wahid Hasyim juga ditulis oleh Awaluddin Baidhowi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul “Perjuangan Politik Islam K.H Wahid Hasyim (1942-1947) skripsi ini menulis tentang perpaduan perjuangan K.H Wahid Hasyim pada masa penjajahan Jepang sampai pada masa kemerdekaan.

Kemudian skripsi tentang pembahasan K.H Wahid Hasyim juga ditulis oleh Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “Pembaruan Pendidikan Islam K.H Wahid Hasyim (Menteri Agama R.I 1949-1952)”. Skripsi ini fokusnya membahas tentang pembaruan yang dilakukan oleh K.H Wahid Hasyim dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan menggabungkan ilmu umum dengan agama serta disini juga dijelaskan sumbangsih K.H Wahid Hasyim selama menjabat sebagai Menteri Agama khususnya dalam bidang pendidikan.

Penelitian saya ini berbeda dari tiga skripsi diatas sama-sama membahas tentang K.H Wahid Hasyim namun isinya berbeda. Memang sangat banyak hal-hal yang menarik jika kita menelisik tentang kehidupan beliau. Skripsi saya ini yang berjudul Peran K.H.A Wahid Hasyim dalam Pengembangan Kementerian Agama (1949-1952 M), nantinya terfokuskan selama beliau menjabat sebagai Menteri Agama atau boleh dikatakan perjuangan beliau setelah masa kemerdekaan adalah memimpin Kementerian Agama di Indonesia.



sumber primer yang penulis gunakan diantaranya, *pertama*, buku karangan Aboebakar Atjeh yang berjudul “Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar” buku ini merupakan rujukan utama tentang tokoh Wahid Hasyim yang penyusunannya dilakukan oleh oleh banyak orang yang tergabung dalam Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim, sumber ini penulis peroleh dari perpustakaan Pondok Pesantren Tebuireng. *Kedua*, beberapa tulisan Wahid Hasyim yang dimuat di jurnal Suara Muslimin Indonesia seperti, tulisannya yang berjudul “Melenyapkan Yang Kolot, Kebangkitan Dunia Islam, Islam Agama Fitrah (Dasar Manusia), sumber ini penulis peroleh dari Museum NU Surabaya. *Ketiga*, sumber primer yang berupa arsip surat keputusan Presiden Soekarno yang menetapkan Wahid Hasyim sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dan arsip surat tentang pembentukan Liga Muslimin Indonesia, ini juga penulis peroleh dari Museum NU Surabaya.

Sumber sekunder juga digunakan berupa buku-buku atau literatur yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat sedikit memberikan tambahan informasi. Sumber sekunder penulis peroleh dari Perpustakaan Daerah Jombang, Surabaya dan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Diantara sumber sekunder yang digunakan, buku karangan Achmad Zaini dengan judul *K.H. Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam*, Aqib Suminto dengan judul *Politik Islam Hindia Belanda*, Saifuddin Zuhri dengan judul *Guruku Orang-orang Pesantren*, Mohammad Rifa’i dengan judul *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1952*, kacang Marijan dengan judul *Quo Vadis NU setelah kembali*







Bab *ketiga* tentang latar belakang berdirinya Kementerian Agama di Indonesia meliputi bab K.H.A. Wahid Hasyim dalam perodesasi berdirinya kementerian agama yang dibagi menjadi sub bab masa Jepang, masa kemerdekaan dan selanjutnya bab tentang sejarah berdirinya Kementerian Agama dan kepemimpinan Kementerian Agama yang dibagi menjadi sub bab kepemimpinan H.M. Rasjidi, B.A, Kepemimpinan Prof. Fathurrahman Kafrawi, K.H. Masjkur meliputi bidang pendidikan, bidang haji dan bidang perkawinan, selanjutnya kepemimpinan Teuku Muhammad Hasan lalu kepemimpinan K.H.A. Wahid Hasyim.

Bab *keempat* adalah Peran K.H.A. Wahid Hasyim dalam Pengembangan Kementerian Agama (1949-1952 M) meliputi restrukturisasi kementerian agama, mendirikan jawatan urusan agama, mendirikan peradilan agama, pembaruan dalam dunia pendidikan meliputi sub-bab, mendirikan perguruan tinggi agama Islam (PTAIN) dan sejarah berdirinya, sub-bab selanjutnya menyeimbangkan ilmu agama dan umum, mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA), selanjutnya memperbaiki manajemen haji.

Bab *kelima* adalah penutup, yang berisi simpulan dari seluruh rangkaian penelitian, serta saran bagi para peneliti-peneliti selanjutnya terkait kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.